

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 65 Tahun 2011  
TANGGAL : 20 September 2011

**RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT  
TAHUN 2011 – 2014**

**RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2011 – 2014**

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Maksud dan Tujuan .....	6
<b>II. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA .....</b>	<b>6</b>
2.1. Kondisi Geografis Wilayah .....	6
2.2. Demografi .....	7
2.3. Perekonomian Wilayah .....	8
<b>III. JENIS KAWASAN, SASARAN, DAN PROGRAM STRATEGIS .....</b>	<b>8</b>
.....	
3.1. Jenis Kawasan di Provinsi Papua .....	8
3.2. Sasaran Pembangunan .....	9
3.3. Program Strategis .....	10
3.4. Sinergi Kawasan Strategis dan MP3EI.....	14
<b>DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2014.....</b>	<b>16</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

---

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Melalui UU 21/2001 tersebut, Provinsi Papua – yang kemudian dimekarkan menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di tahun 2006—diamanahkan tanggung jawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga memiliki semangat rekonsiliasi dan penyelesaian masalah yang ada di Provinsi Papua secara menyeluruh, serta memberikan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.

Enam tahun setelah penetapan dan pelaksanaan UU Nomor 21/2001 tersebut, para pemangku kepentingan berpendapat bahwa perubahan kesejahteraan masyarakat terutama penduduk asli Papua masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan tersebut, pemerintah berinisiatif untuk melakukan percepatan melalui penetapan Inpres 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai suatu kumpulan kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan di kedua provinsi tersebut dengan meningkatkan efektifitas koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan antar sektor dan pusat-daerah yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Inpres 5/2007 menekankan pendekatan kebijakan baru (*the new deals policy for Papua*) dengan lima aspek strategis yaitu:

- a. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- d. Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan Negara.
- e. Perlakuan khusus (*affirmative action*) bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia putra-putri asli Papua.

Setelah 2 tahun pelaksanaan Inpres 5/2007, berbagai koordinasi antara pemerintah pusat (K/L) dan pemerintah Provinsi Papua telah dilakukan dan menghasilkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Namun evaluasi Inpres 5/2007 menunjukkan bahwa percepatan pembangunan yang dilakukan terutama dalam kaitannya dengan program prioritas pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan masih belum memberikan peningkatan yang signifikan karena tersendatnya pembangunan infrastruktur, belum

terlaksananya ...

terlaksananya sistem pendidikan khusus yang menjangkau masyarakat Papua, dan terkendalanya penyiapan sarana prasarana pelayanan kesehatan serta masih terisolirnya wilayah-wilayah sasaran.

Salah satu penyebab lambatnya upaya percepatan adalah belum optimalnya pengelolaan dana yang ada, terutama terkait sinkronisasi program/kegiatan serta anggaran pusat dan daerah termasuk pendanaan sektoral pusat melalui K/L dan pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur di kedua Provinsi. Untuk itu diperlukan kelanjutan upaya Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan memperluas bidang kebijakan pokok percepatan dengan prinsip pengembangan kawasan yang diarahkan untuk keterpaduan dan sinergi lintas bidang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua dan Papua Barat yang terdiri dari:

- a. Penguatan ketahanan pangan.
- b. Penanggulangan kemiskinan.
- c. Pengembangan ekonomi rakyat.
- d. Peningkatan pelayanan pendidikan.
- e. Peningkatan pelayanan kesehatan.
- f. Pengembangan infrastruktur dasar.
- g. Pemihakan terhadap masyarakat asli Papua dan Papua Barat.

Dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diperlukan dukungan dari kebijakan yang bersifat regulasi dan kelembagaan sebagai berikut:

- a. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan.
- b. Keamanan dan ketertiban.
- c. Pengembangan kapasitas kelembagaan.

Selain melalui dukungan program-program di atas, Percepatan Pembangunan Provinsi Papua, juga didukung program-program yang terkait dengan agenda pelaksanaan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025, koridor ekonomi Papua-kepulauan Maluku.

Dengan tetap memegang semangat koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program/kegiatan percepatan pembangunan maka masing-masing kebijakan pokok percepatan dan faktor pendukung kebijakan pokok percepatan tersebut perlu dituangkan dalam Rencana Aksi Percepatan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat 2012-2016. Penentuan program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana aksi merupakan prioritas dalam rangka percepatan yang sifatnya dikhususkan termasuk juga program dan kegiatan baru yang bersifat cepat terwujud, yang diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2011-2014.

---

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

---

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, khususnya untuk Provinsi Papua ini adalah:

- a. memberikan penjabaran dan arahan yang jelas dalam percepatan masing-masing kebijakan pokok percepatan maupun faktor pendukung kebijakan pokok percepatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2011-2014;
- b. memberikan penjelasan sasaran, kebijakan, strategi pelaksanaan serta pembiayaan agar memberikan hasil yang optimal;
- c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi berbagai sumber daya yang ada di tingkat pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota yang dituangkan dalam program dan kegiatan strategi yang menjadi prioritas utama dalam upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua tahun 2011-2014. Program dan kegiatan strategis yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2011-2016;
- d. rencana aksi merupakan dokumen perencanaan yang mensinkronkan program/kegiatan pusat-daerah serta rencana pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi serta APBD Kab/Kota serta kontribusi lembaga donor dan swasta (PPP);
- e. sebagai bagian dokumen yang dijadikan bahan masukan dalam penyusunan RPJM Daerah Provinsi Papua 2011-2016, maupun RPJM Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

## II. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA

---

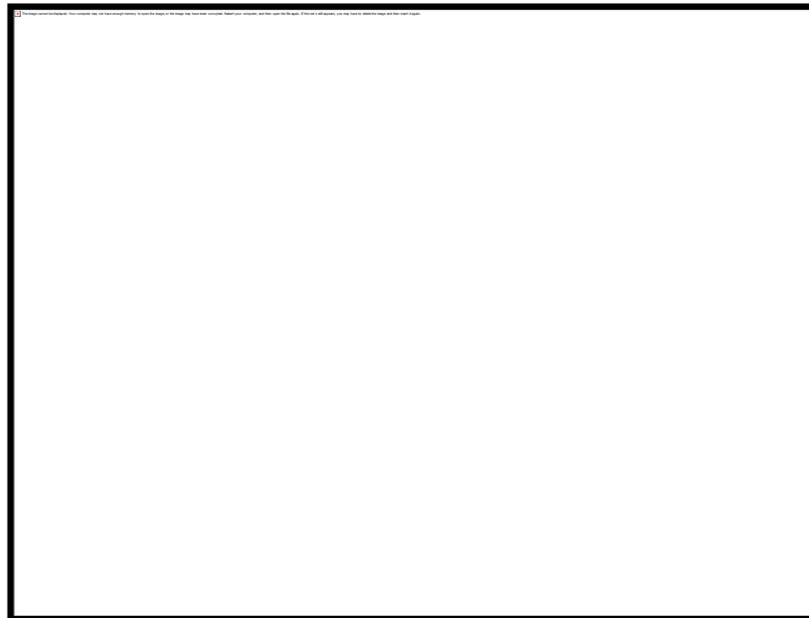
### 2.1. KONDISI GEOGRAFIS WILAYAH

---

Provinsi Papua dengan luas 317.062 kilometer persegi terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk 2.851.999 jiwa (BPS, 2010). Provinsi Papua, kaya akan sumber daya alam seperti mineral (bahan tambang), hutan, dan kawasan yang heterogen seperti hutan, pegunungan, sungai, danau, rawa, dan gambut. Melimpahnya sumber daya alam, juga karena kebijakan desentralisasi fiskal dan ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan otonomi, menyebabkan tingkat pertumbuhan tahunan Provinsi Papua jauh di atas rata-rata nasional untuk beberapa tahun, dan dari segi fiskal merupakan provinsi terkaya kedua di Indonesia. Sektor pertambangan, minyak dan gas (69%) mendominasi perekonomian di Provinsi Papua, diikuti oleh sektor pertanian (11%), administrasi pemerintahan (5%), sektor transportasi (4%), sektor komunikasi (4%), sektor konstruksi (4%), sektor perdagangan (4%) dan lainnya (3%).

Namun, ...

Namun, pendapatan Provinsi Papua yang besar dan pertumbuhan PDB yang mengesankan tidak diimbangi dengan kinerja yang memadai dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan manusia. Pada tahun 2009, Provinsi Papua memiliki IPM terendah di Indonesia (64,3) dibandingkan dengan rata-rata nasional (71,5). Kebijakan nasional untuk memerangi kemiskinan, telah berhasil menurunkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan persentase penduduk miskin saat ini 12,42% (BPS, 2011), tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap masyarakat Provinsi Papua yang tetap mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, dengan 31,98% penduduk Provinsi Papua hidup di bawah rata-rata nasional (BPS 2011). Kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi di beberapa pusat kota, sedangkan penduduk kurang berinteraksi satu sama lainnya karena kondisi ekstrim topografi daerah, terlihat pada pola permukiman yang tersebar dan sering hanya dihubungkan oleh angkutan udara, transportasi laut, atau dengan berjalan kaki. Selain itu infrastruktur juga terbatas dan terfragmentasi, kesenjangan gender yang parah dan meluas, HIV menyebar dengan cepat, dan tindak korupsi yang meluas di seluruh lapisan masyarakat. Tidak mengherankan jika Provinsi Papua tertinggal dari provinsi-provinsi lain dalam mencapai indikator Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals = MDG*) dan dengan perkembangan yang ada mungkin tidak akan mencapai sejumlah tujuan MDGs, khususnya yang terkait dengan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan taraf kesehatan.



**Gambar 2.1.**  
**Peta Wilayah Administrasi Provinsi Papua Menurut Kabupaten**

---

## 2.2. DEMOGRAFI

---

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Provinsi Papua terus meningkat. Pada tahun 2003 jumlah penduduk sebesar 1.823.872 jiwa, kemudian pada tahun 2007 meningkat menjadi 2.015.616 jiwa. Sedangkan data terakhir berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Papua sementara adalah 2.851.999 orang, yang terdiri atas 1.510.285 laki-laki dan 1.341.714 perempuan. Dengan luas wilayah Provinsi Papua sekitar 317.062 km<sup>2</sup> dan didiami oleh 2.851.999 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Papua adalah sebanyak sembilan orang per km<sup>2</sup>, hal ini mengindikasikan bahwa masih luasnya wilayah di Provinsi Papua yang tidak berpenghuni.

---

## 2.3. PEREKONOMIAN WILAYAH

---

Perekonomian Provinsi Papua yang kaya akan sumber daya alam berupa tambang migas dan non migas. Hasil dari kegiatan ekonomi di sektor pertambangan tersebut mampu memberikan sumbangan nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian Provinsi Papua. Sektor pertambangan konsentrat tembaga memberikan sumbangan yang sangat dominan terhadap perkembangan perekonomian Provinsi Papua. Sehingga peningkatan maupun penurunan laju pertumbuhan pada sektor konsentrat tembaga ini akan sangat berpengaruh terhadap arah pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua.

Sejak tahun 2008, Perkembangan Ekonomi Tahunan (yoy) Provinsi Papua mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari -0,78% pada 2008 meningkat menjadi 20,34% pada tahun 2009. Sumbangan terbesar dalam peningkatan perkembangan ekonomi di Provinsi Papua ini adalah sektor pertambangan dan penggalian (14,23%). Sementara pada 2 triwulan pertama pada tahun 2010 sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan, sehingga Perkembangan Ekonomi pada tahun 2010, sampai pada triwulan kedua tumbuh negatif (kontraksi) dan laju tumbuh lebih rendah (lambat) dibandingkan periode triwulan sebelumnya, yaitu (-15,69%) pada triwulan pertama, dan semakin menurun menjadi (-22,42%).

## III. JENIS KAWASAN, SASARAN, DAN PROGRAM STRATEGIS

---

### 3.1. JENIS KAWASAN DI PROVINSI PAPUA

---

#### 3.1.1. Kawasan Terisolir

Provinsi Papua memiliki karakteristik geografis yang beraneka ragam, terdiri dari dataran rendah, rawa-rawa, pesisir, dan pegunungan. Kawasan Pegunungan Tengah merupakan daerah terisolir, karena secara umum hampir sebagian besar wilayah ini belum memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya

pembangunan ...

pembangunan, yang menyebabkan terkendalanya kinerja sektor pengembangan infrastruktur dasar, sektor transportasi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan; yang menyebabkan rendahnya pengembangan ekonomi kerakyatan, serta masih tingginya tingkat kemiskinan. Ada pun kabupaten-kabupaten yang berada di kawasan pegunungan tengah yang dikategorikan sebagai wilayah terisolir diantaranya: **Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Yahukimo.** Kabupaten-kabupaten ini umumnya mempunyai kondisi topografi maupun geografi yang berbukit terjal, gunung-gunung serta lembah yang curam, juga dataran ngarai yang sulit ditembus melalui transportasi darat, sehingga masih sangat mengandalkan transportasi udara.

### 3.1.2. Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan di Provinsi Papua adalah daerah yang berada di luar perkotaan, namun tidak digolongkan ke dalam kawasan terisolir, di mana kondisi prasarana dan sarana infrastruktur baik jalan/jembatan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lainnya masih sangat tertinggal dan membutuhkan perhatian yang tinggi dari pemerintah. Kondisi perdesaan di Provinsi Papua memiliki karakteristik geografis yang beraneka ragam, terdiri dari dataran rendah, rawa-rawa, pesisir, dan pegunungan. Dibandingkan dengan daerah pesisir, kawasan pegunungan tengah di Provinsi Papua merupakan daerah perdesaan yang hingga saat ini masih sangat sulit dijangkau dan sebagian besar mengandalkan moda transportasi udara dan sungai untuk mencapainya. Adapun kawasan perdesaan, melingkupi **Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mimika, Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kep. Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai.**

### 3.1.3. Kawasan Perkotaan

Gambaran umum kawasan Perkotaan di Provinsi Papua dengan topografi Provinsi Papua yang begitu beragam kawasan pantai, kawasan pegunungan dan lembah, mempunyai karakteristik tersendiri meliputi karakteristik geografis yang beraneka ragam, terdiri dari dataran rendah, rawa-rawa, pesisir, dan pegunungan. Adapun kawasan perkotaan di Provinsi Papua, meliputi **29 kabupaten/kota yang sekaligus menjadi ibukota kabupaten.** Jika dipandang dari sisi kependudukan, komposisi penduduk di kawasan ini bersifat sangat heterogen dan dari sisi penghidupan, yang sudah lebih maju dipandang dari aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur umum.

### 3.1.4. Kawasan ...

#### 3.1.4. Kawasan Strategis

Pembangunan Kawasan strategis adalah pembangunan yang difokuskan pada lokasi yang memiliki potensi sumber daya alam (*backward linkages*) dan sumber daya manusia terampil, yang didukung infrastruktur wilayah yang mendukung investasi yang berbasis potensi ekonomi lokal dan membuka pasar domestik dan internasional (*forward linkages*). Kawasan strategis di Provinsi Papua adalah: **Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Biak.**

---

### 3.2. SASARAN PEMBANGUNAN

---

Sasaran akhir yang ingin dicapai melalui penetapan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) yang merupakan keberlanjutan dari Inpres 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, adalah:

1. Meningkatnya ketahanan pangan lokal melalui optimalisasi potensi bahan pangan lokal.
2. Berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya perekonomian masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam.
3. Terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama yang membuka keterisolasian wilayah melalui peningkatan aksesibilitas transportasi dan informasi serta layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi) di kawasan terisolir.
4. Terjangkaunya pendidikan yang bermutu dan relevan di kawasan terisolir.
5. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat di kawasan terisolir.
6. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi.
7. Terwujudnya kebijakan yang berpihak kepada penduduk asli Papua, golongan ekonomi kecil dan menengah, serta menuju kesetaraan dalam proses pembangunan di kawasan terisolir.
8. Meningkatnya keamanan dan ketertiban serta penegakkan supremasi hukum di kawasan terisolir.
9. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi di kawasan terisolir.

---

### 3.3. PROGRAM PENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA

---

Demi tercapainya sasaran akhir dari rencana aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka perlu ditentukan arah kebijakan percepatan pembangunan yang akan membantu mengarahkan setiap **program strategis** percepatan pembangunan di Provinsi Papua.

Arah kebijakan maupun program strategis yang diambil harus berdasarkan gambaran kondisi dan karakteristik wilayah serta permasalahan yang dihadapi masing-masing kawasan. Untuk itu kebijakan yang diambil untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua tahun 2011-2014 adalah:

**1. Program Ketahanan Pangan:**

- a) peningkatan ketahanan pangan dengan peningkatan keanekaragaman produksi makanan berbahan baku lokal (sagu, ubi jalar, padi, jagung, perikanan);
- b) pengolahan hasil pertanian menjadi bahan makanan (terutama sagu, ubi kayu, jagung, ikan) di kawasan terisolir;
- c) peningkatan distribusi hasil pertanian/pangan ke seluruh wilayah terpencil/terisolir.

**2. Program Penanggulangan Kemiskinan:**

- a) peningkatan kemampuan masyarakat dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- b) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat;
- c) peningkatan permodalan UMKM dalam usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat;
- d) pendampingan dan penyuluhan UMKM dalam usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat;
- e) peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui pendirian BLK Pertanian;
- f) pendampingan pertanian;
- g) pengembangan teknologi tepat guna usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat;
- h) distribusi dan pemasaran hasil usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat.

**3. Program Pengembangan Ekonomi Rakyat:**

- a) pengembangan agroindustri perikanan (tangkap dan budidaya laut/tawar);
- b) pengembangan agroindustri peternakan (ayam, babi, sapi dan kelinci);
- c) pengembangan hasil hutan kayu dan non kayu (madu, rotan, gaharu, sagu, buah merah);
- d) pengembangan agroindustri hortikultura (sayur dan buah-buahan);
- e) pengembangan agroindustri perkebunan (kopi, kelapa, kakao dan karet);
- f) pengembangan industri kecil dan kerajinan.

**4. Program ...**

**4. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan:**

- a) pendidikan dasar dan menengah secara gratis;
- b) peningkatan pendidikan dasar dan menengah berpola asrama;
- c) pendirian sekolah unggulan;
- d) pendirian sekolah bertaraf internasional di wilayah perbatasan negara;
- e) pendirian Sekolah Menengah Kejuruan;
- f) pengadaan tenaga guru kontrak;
- g) Sertifikasi guru;
- h) peningkatan kualitas kepala sekolah melalui pola pemagangan kepala sekolah di luar Provinsi Papua;
- i) pendirian dan pengembangan Sekolah Pendidikan Keguruan;
- j) peningkatan kualitas perguruan tinggi di Provinsi Papua melalui kerjasama dengan PTN unggulan di luar Provinsi Papua;
- k) penyediaan perumahan guru.

**5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

- a) pelayanan kesehatan keliling (*mobile clinic*);
- b) asuransi kesehatan;
- c) pelayanan kesehatan gratis dan bebas biaya rawat inap untuk pasien kelas 3 RSUD;
- d) pendirian Sekolah Kebidanan/Keperawatan;
- e) pengadaan dokter spesialis melalui kontrak;
- f) pendirian rumah sakit pendidikan;
- g) pendirian rumah sakit rujukan;
- h) peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu;
- i) peningkatan jumlah Puskesmas Perawatan;
- j) peningkatan status gizi siswa melalui PMTAS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah);
- k) penyuluhan kesehatan lingkungan (sanitasi lingkungan);
- l) pemberantasan penyakit menular (malaria, HIV AIDS, TBC);
- m) penyediaan Pusat Pelayanan Malaria (*Malaria Center*);
- n) penyediaan perumahan bagi tenaga medis.

**6. Program Pengembangan Infrastruktur Dasar**

- a) penyediaan 750.000 unit rumah rakyat sehat dan layak huni;
- b) pembangunan dan pengembangan infrastruktur makro;
- c) pembangunan irigasi dan pencetakan sawah;
- d) peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan air bersih di seluruh wilayah;
- e) pembangunan dan peningkatan lapangan udara;
- f) peningkatan frekuensi penerbangan udara perintis;

g) pembangunan ...

- g) pembangunan dan Peningkatan Dermaga Sungai;
- h) pembangunan pusat logistik (*logistic center*);
- i) pembangunan dan peningkatan pelabuhan laut;
- j) pembangunan pelabuhan perikanan;
- k) penyediaan sumber energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS);
- l) peningkatan jaringan distribusi PLN;
- m) pembangunan PLTA Memberamo;
- n) pembangunan PLTA Sungai Yawei di Urumuka;
- o) pemanfaatan potensi sumberdaya mineral bagi kesejahteraan masyarakat
- p) peningkatan aksesibilitas komunikasi di wilayah terisolir/terpencil/perbatasan negara;
- q) peningkatan keterjangkauan informasi seluler melalui kerjasama operator seluler (swasta);
- r) peningkatan pelayanan melalui pemberian izin kepada swasta di bidang penerbangan.

#### **7. Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua**

- a) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi anggota TNI;
- b) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi anggota Polri;
- c) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk mengikuti pendidikan Akmil dan Akpol;
- d) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk sekolah penerbangan;
- e) pemberian fasilitas bagi putra/putri asli Papua untuk pengembangan bakat/potensi olahraga;
- f) pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi di PTN unggul di luar Provinsi Papua;
- g) pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi di PTN fakultas kedokteran;
- h) pemberian kesempatan bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi PNS di wilayah lain di luar Provinsi Papua;
- i) pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STAN;
- j) pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STPDN;
- k) pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di sekolah tinggi statistik;
- l) pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di sekolah tinggi pertanian.

#### **8. Program ...**

**8. Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan**

- a) percepatan penetapan RTRW provinsi dan kabupaten/kota;
- b) penyusunan dan penetapan masterplan kawasan strategis;
- c) dilenisasi/pemetaan tanah terhadap hak ulayat;
- d) sertifikasi tanah non ulayat;
- e) penyelesaian sengketa pertanahan.

**9. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban**

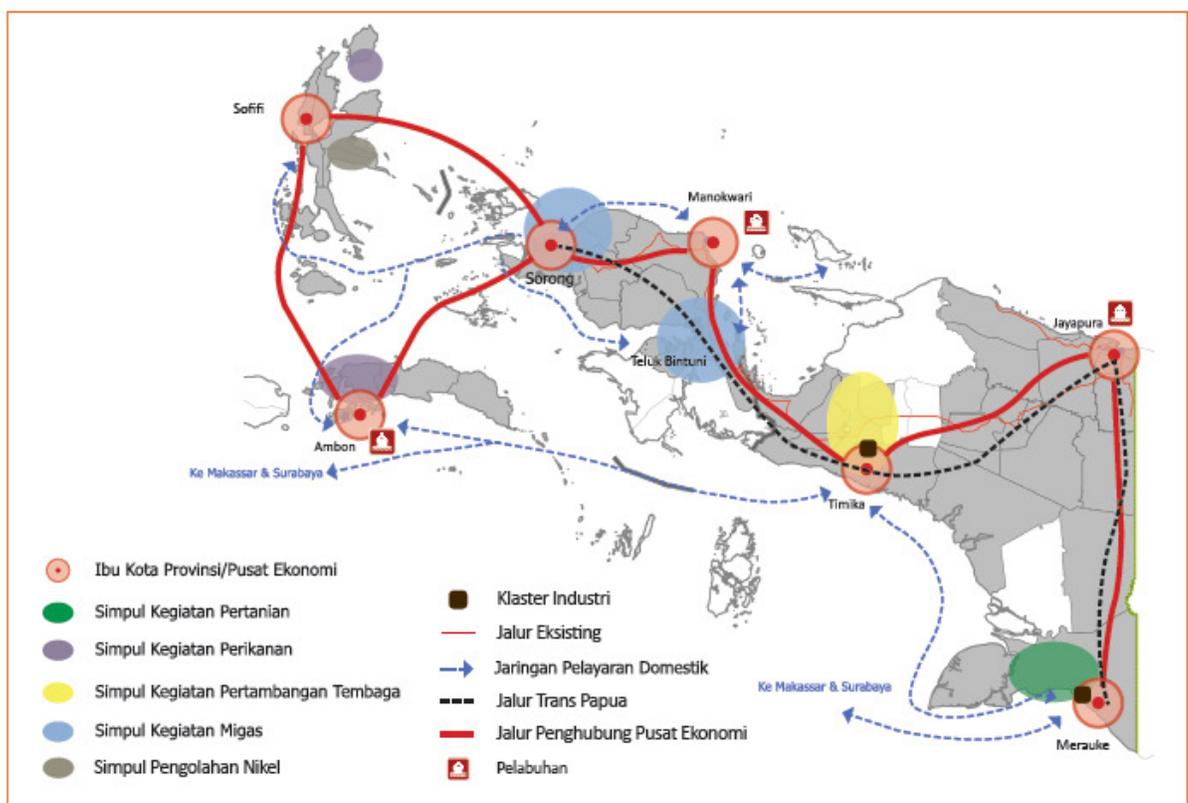
- a) pemetaan masalah sumber konflik antara pemerintah dengan masyarakat;
- b) pendekatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat Tanah Papua, dalam rangka membangun kesepahaman bidang politik dan budaya;
- c) penyusunan rencana kebijakan politik dan budaya;
- d) penyiapan mekanisme penyelesaian bersama masalah-masalah sosial-politik dan sosial-budaya dalam kerangka NKRI.

**10. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan**

- a) penetapan peraturan turunan (operasional) dari UU 21/2001 (Perdasi, Perdasus dan Pergub);
- b) peningkatan koordinasi antartingkat pemerintahan (pusat-provinsi-kabupaten/kota);
- c) pendidikan dan peningkatan kualitas SDM aparatur (kepamongprajaan, perencanaan, dan pelaporan keuangan);
- d) penyusunan dokumen perencanaan;
- e) peningkatan kemampuan sumberdaya manusia aparatur pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- f) pendirian sekolah kepamongprajaan (STPDN) di Jayapura;
- g) evaluasi berbagai peraturan daerah yang menghambat pembangunan (investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat);
- h) evaluasi terhadap pemekaran wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kampung;
- i) peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
- j) peningkatan penanganan di wilayah perbatasan negara.

### 3.4. SINERGI KAWASAN STRATEGIS DAN MP3EI

Pembangunan kawasan strategis di Provinsi Papua dimaksudkan untuk meningkatkan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan dengan pengembangan klaster industri dan atau kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis sumber daya unggulan di kawasan strategis sesuai dengan arahan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025 pada Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku. Kawasan strategis di Provinsi Papua dalam MP3EI 2011-2025 adalah Jayapura, Timika, dan Merauke.



**Gambar 3.4**  
**Peta Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku**

Adapun program/kegiatan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada kawasan strategis yang termasuk di dalamnya program/kegiatan MP3EI adalah:

a) pemberian kemudahan berinvestasi (insentif investasi);

b) pengembangan ...

- b) pengembangan kawasan strategis Merauke sebagai Pusat Pengembangan Pangan dan energi Terpadu/Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE);
- c) pengembangan kawasan strategis Merauke sebagai pusat pengembangan minapolitan;
- d) pengembangan kawasan strategis Mimika sebagai pusat pengembangan industri dan pertambangan;
- e) pengembangan kawasan strategis Biak sebagai pusat pengembangan perikanan dan pariwisata;
- f) pengembangan kawasan strategis Biak sebagai pusat peluncuran satelit;
- g) pengembangan kawasan strategis Jayapura sebagai pusat perdagangan, industri dan jasa;
- h) pengembangan Skouw sebagai pusat perdagangan antar negara;
- i) pembangunan pabrik semen;
- j) pendirian sekolah penerbangan;
- k) pengembangan teknologi pertanian, peternakan, perikanan di Merauke;
- l) membangun Kawasan Industri Tembaga di Timika sebagai lokasi industri pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga dan industri-industri hilir lainnya (anoda, katoda, slab, billet, powder, wire, wire rod, cable).

**DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2011-2014**

**A. Program Pendukung Percepatan Pembangunan Provinsi Papua**

**(1) Program Ketahanan Pangan**

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan produksi tanaman pangan lokal (ubi jalar, sagu, padi, jagung, ikan)	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Pemda</li> </ul>
2	Pengolahan hasil pertanian menjadi bahan makanan (sagu, ubi kayu, jagung, ikan)	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- BPPT</li> <li>- Pemda</li> </ul>

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Peningkatan distribusi hasil Pertanian/Pangan ke seluruh wilayah terpencil/terisolir	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Perdagangan</li> <li>- Pemda</li> </ul>

(2) Program Penanggulangan Kemiskinan

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan kemampuan Masyarakat dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Kop &amp; UMKM</li> <li>- Pemda</li> </ul>

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- Pemda</li> </ul>
3	Peningkatan permodalan UMKM usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Kop &amp; UMKM</li> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- Pemda</li> </ul>
4	Pendampingan dan Penyuluhan UMKM usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Kop &amp; UMKM</li> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- Pemda</li> </ul>

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b>  Kab. Keerom, Kab. Jayapura,  Kab. Sarmi, Kab. Waropen,  Kab. Nabire, Merauke, Kab.  Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.  Mappi, Kab. Mimika, Kab.  Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.  Yapen, Kab. Mamberamo Raya  dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai,  Kab. Deiyai</p>	-
5	Peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui Pendirian BLK Pertanian	<p><b><u>Kawasan Strategis :</u></b>  Kab. Jayapura, Kab. Merauke,  Jaya Wijaya, Timika, Nabire</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Nakertrans</li> <li>- Pemda</li> </ul>
6	Pendampingan Pertanian	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b>  Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,  Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,  Kab. Pegunungan Bintang,  Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,  Kab. Memberamo Tengah,  Kab. Tolikara, Kab. Puncak  Jaya, Kab. Yahukimo</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b>  Kab. Keerom, Kab. Jayapura,  Kab. Sarmi, Kab. Waropen,  Kab. Nabire, Merauke, Kab.  Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.  Mappi, Kab. Mimika, Kab.  Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.  Yapen, Kab. Mamberamo Raya  dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai,  Kab. Deiyai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Nakertrans</li> <li>- Pemda</li> </ul>
7	Pengembangan Teknologi Tepat Guna usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b>  Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,  Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,  Kab. Pegunungan Bintang,  Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,  Kab. Memberamo Tengah,  Kab. Tolikara, Kab. Puncak  Jaya, Kab. Yahukimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Kop &amp; UMKM</li> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- BPPT</li> <li>- Pemda</li> </ul>

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
		<b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	-
8	Distribusi dan Pemasaran hasil usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat	<b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo  <b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	- Kem. Kop & UMKM - Kem. Pertanian - Kem. Kehutanan - Kem. Kelautan dan Perikanan - Kem. Perindustrian - BPPT - Pemda

**(3) Program Pengembangan Ekonomi Rakyat**

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan agroindustri Perikanan (tangkap dan budidaya laut/tawar)	<b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Memberamo Tengah	- Kem. Kelautan dan Perikanan - Pemda

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b>  Kab. Keerom, Kab. Jayapura,  Kab. Sarmi, Kab. Waropen,  Kab. Nabire, Merauke, Kab.  Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.  Mappi, Kab. Mimika, Kab.  Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.  Yapen, Kab. Mamberamo  Raya dan Kab. Paniai, Kab.  Dogiyai, Kab. Deiyai</p>	-
2	Pengembangan agroindustri Peternakan (ayam, babi, sapi dan kelinci)	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b>  Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,  Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,  Kab. Pegunungan Bintang,  Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,  Kab. Memberamo Tengah,  Kab. Tolikara, Kab. Puncak  Jaya, Kab. Yahukimo</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b>  Kab. Keerom, Kab. Jayapura,  Kab. Sarmi, Kab. Waropen,  Kab. Nabire, Merauke, Kab.  Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.  Mappi, Kab. Mimika, Kab.  Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.  Yapen, Kab. Mamberamo  Raya dan Kab. Paniai, Kab.  Dogiyai, Kab. Deiyai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Pemda</li> </ul>
3	Pengembangan hasil hutan kayu dan non kayu (madu, rotan, gaharu, sagu, buah merah)	<p><b><u>Kawasan Terisolir:</u></b>  Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,  Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,  Kab. Pegunungan Bintang,  Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,  Kab. Memberamo Tengah,  Kab. Tolikara, Kab. Puncak  Jaya, Kab. Yahukimo</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b>  Kab. Keerom, Kab. Jayapura,  Kab. Sarmi, Kab. Waropen,  Kab. Nabire, Merauke, Kab.  Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.  Mappi, Kab. Mimika, Kab.  Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.  Yapen, Kab. Mamberamo  Raya dan Kab. Paniai, Kab.  Dogiyai, Kab. Deiyai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Pemda</li> </ul>

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Pengembangan agroindustri Hortikultura (Sayur dan Buah-buahan)	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Waropen, Kab. Nabire, Kab. Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Mimika dan Kab. Paniai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- Pemda</li> </ul>
5	Pengembangan agroindustri perkebunan (kopi, kelapa, kakao dan karet)	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Pemda</li> </ul>
6	Pengembangan industri kecil dan kerajinan	<p><b><u>Seluruh Kawasan :</u></b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- Pemda</li> </ul>

**(4) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan**

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendidikan dasar dan menengah gratis	<p><b><u>Seluruh Kawasan :</u></b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pendidikan Nasional</li> <li>- Pemda</li> </ul>

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Peningkatan pendidikan dasar dan menengah berpola asrama	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pendidikan Nasional</li> <li>- Pemda</li> </ul>
3	Pendirian sekolah unggulan	<p><b><u>Kawasan Perkotaan :</u></b> Di seluruh ibukota kabupaten/kota di Prov. Papua</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pendidikan Nasional</li> <li>- Pemda</li> </ul>
4	Pendirian sekolah bertaraf internasional di wilayah perbatasan negara	<p><b><u>Kawasan Terisolir/Perbatasan Negara :</u></b> Kab. Merauke, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Pegunungan Bintang,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pendidikan Nasional</li> <li>- Pemda</li> </ul>
5	Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan	<p><b><u>Kawasan Strategis :</u></b> Kab. Jayapura, Kab. Merauke, Kab. Timika, Kab. Biak</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Nabire, Kab. Boven Digoel, Kab. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pendidikan Nasional</li> <li>- Pemda</li> </ul>
6	Pengadaan tenaga guru kontrak	<p><b><u>Kawasan Terisolir:</u></b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pendidikan Nasional</li> <li>- Pemda</li> </ul>

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
		<b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	-
7	Sertifikasi guru	<b><u>Seluruh Kawasan :</u></b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem. Pendidikan Nasional - Pemda
8	Peningkatan kualitas kepala sekolah melalui pola pemagangan Kepala Sekolah di Luar Papua	<b><u>Kawasan Terisolir:</u></b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo  <b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	- Kem. Pendidikan Nasional - Pemda
9	Pendirian dan pengembangan Sekolah Pendidikan Keguruan	<b><u>Kawasan Terisolir:</u></b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo	- Kem. Pendidikan Nasional - Pemda

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
		<b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	-
10	Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi di Papua melalui kerjasama dengan PTN unggulan di luar Papua	<b>Kawasan Perkotaan :</b> Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Merauke, Kab. Mimika, Kab. Jayawijaya, Kab. Biak, Kab. Kep. Yapen, Kab. Nabire	- Kem. Pendidikan Nasional - Pemda
11	Penyediaan rumah guru	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem. Pendidikan Nasional - Kem. PU - Pemda

**(5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Kesehatan Keliling ( <i>Mobile Clinic</i> )	<b>Kawasan Terisolir:</b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo  <b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	- Kem. Kesehatan - Pemda

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Asuransi Kesehatan	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem. Kesehatan - Pemda
3	Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bebas Biaya Rawat Inap Untuk Pasien kelas 3 RSUD	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem. Kesehatan - Pemda
4	Pendirian Sekolah Kebidanan/keperawatan;	<b>Kawasan Terisolir:</b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo  <b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	- Kem. Kesehatan - Pemda
5	Pengadaan Dokter Spesialis melalui Kontrak	<b>Kawasan Terisolir:</b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo  <b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	- Kemenko Kesra* - Kem. Kesehatan - Pemda

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Pendirian Rumah Sakit Pendidikan	<b>Kawasan Perkotaan :</b> Kota Jayapura	- Kem. Kesehatan - Pemda
7	Pendirian Rumah Sakit Rujukan	<b>Kawasan Perkotaan :</b> Kab. Biak, Kab. Merauke, Kab. Jayawijaya, Kab. Mimika, Kab. Nabire	- Kem. Kesehatan - Pemda
8	Peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu	<b>Kawasan Terisolir:</b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo  <b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	- Kem. Kesehatan - Pemda
9	Peningkatan jumlah Puskesmas Perawatan	<b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	- Kem. Kesehatan - Pemda
10	Peningkatan Status Gizi Siswa melalui PMTAS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah)	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem. Kesehatan - Pemda
11	Penyuluhan kesehatan lingkungan (sanitasi lingkungan)	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem. Kesehatan - Pemda

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Pemberantasan penyakit menular (Malaria, HIV AIDS, TBC)	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem. Kesehatan - Pemda
13	Pendirian Pusat Pelayanan Malaria (Malaria Centre)	<b>Kawasan Perkotaan :</b> Kab. Jayapura, Kab. Merauke, Kab. Biak, Kab. Mimika, Kab. Nabire	- Kem. Kesehatan - Pemda
14	Penyediaan rumah tenaga medis	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem. Kesehatan - Kem. PU - Pemda

**(6) Program Pengembangan Infrastruktur Dasar**

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	- (4)
1	Penyediaan 750.000 unit rumah rakyat sehat dan layak huni	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem. PU - Kem. Pera - Kem. Nakertrans - Pemda
2	Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur makro	<b>Kawasan Strategis :</b> Kab. Jayapura, Kab. Merauke, Kab. Mimika, Kab. Biak  <b>Kawasan Perdesaan:</b> Kab Timika, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Paniai , Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya  <b>Kawasan Perkotaan :</b> Di seluruh ibukota kabupaten/kota di Prov. Papua	- Kem. PU - Pemda
3	Pembangunan Irigasi dan pencetakan sawah;	<b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Nabire, Kab. Merauke, Kab. Mimika, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai	- Kem. PU - Pemda

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	- (4)
4	Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan air bersih di seluruh wilayah	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b>  Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b>  Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. PU</li> <li>- Pemda</li> </ul>
5	Pembangunan dan peningkatan lapangan udara	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b>  Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b>  Kab. Nabire, Boven Digul, Asmat, Mappi, Mimika, Biak, Kep. Yapen, Mamberamo Raya</p> <p><b><u>Kawasan Perkotaan :</u></b>  Kab. Jayapura, Kab. Merauke, Kab. Mimika, Kab. Jayawijaya, Kab. Biak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Perhubungan</li> <li>- Pemda</li> </ul>

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	- (4)
6	Peningkatan frekuensi penerbangan udara perintis	<b><u>Kawasan Terisolir</u></b> : Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo	- Kem. Perhubungan - Pemda
7	Pembangunan dan Peningkatan Dermaga Sungai	<b><u>Kawasan Terisolir</u></b> : Kab. Nduga, Kab. Memberamo Tengah  <b><u>Kawasan Perdesaan</u></b> : Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Mamberamo Raya	- Kem. Perhubungan - Pemda
8	Pembangunan <i>logistic center</i>	<b><u>Kawasan Terisolir</u></b> : Kab. Nduga, Kab. Memberamo Tengah  <b><u>Kawasan Perdesaan</u></b> : Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Mamberamo Raya	- Kem. Perhubungan - Kem. ESDM - Kem. PU - Pemda
9	Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Laut	<b><u>Kawasan Perdesaan</u></b> : Kab. Nabire, Merauke, Sarmi, Biak, Jayapura	- Kem. Perhubungan - Pemda
10	Pembangunan Pelabuhan Perikanan	<b><u>Kawasan Perkotaan</u></b> : Kab. Mimika, Kab. Merauke, Kab. Biak, Kab. Jayapura	- Kem. KP - Pemda
11	Penyediaan Sumber Energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS)	<b><u>Seluruh Kawasan</u></b> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem. ESDM - Pemda
12	Peningkatan jaringan distribusi PLN	<b><u>Seluruh Kawasan</u></b> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem. ESDM - Pemda
13	Pembangunan PLTA Memberamo	<b><u>Seluruh Kawasan</u></b> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem. ESDM - Pemda
14	Pembangunan PLTA Sungai Yawei di Urumuka	Kab. Deiyai dan Kab. Dogiyai	- Kem. ESDM - Pemda

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	- (4)
15	Pemanfaatan potensi Sumberdaya Mineral bagi kesejahteraan masyarakat	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem. ESDM - Pemda
16	Peningkatan aksesibilitas komunikasi di wilayah terisolir/terpencil/perbatasan negara	<b>Kawasan Terisolir:</b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo  <b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	- Kem. Kominfo - Pemda
17	Peningkatan keterjangkauan informasi seluler melalui kerjasama operator seluler (swasta)	<b>Kawasan Terisolir:</b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo  <b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	- Kem. Kominfo - Pemda

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	- (4)
18	Peningkatan pelayanan melalui pemberian izin kepada swasta di bidang penerbangan	<b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo	- Kem. Perhubungan - Pemda

**(7) Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua**

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	- (4)
1	Pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi anggota TNI	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Pemda
2	Pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi anggota Polri	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Pemda
3	Pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk mengikuti pendidikan Akmil dan Akpol	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kemhan - Pemda
4	Pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk sekolah pilot	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem.Pehubungan - Pemda
5	Pemberian fasilitas bagi putra/putri asli Papua untuk pengembangan bakat/potensi olahraga	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem.Diknas* - Pemda
6	Pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi di PTN unggul di luar Papua	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem.Diknas* - Pemda

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi di PTN fakultas kedokteran	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem.Diknas* - Pemda
8	Pemberian kesempatan bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi PNS di wilayah lain di luar Papua	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kemendagri - Kem. PAN dan RB - Pemda
9	Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STAN	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kemkeu - Pemda
10	Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STPDN	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kemendagri - Pemda
11	Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di sekolah tinggi statistik	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- BPS - Pemda
12	Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di sekolah tinggi pertanian	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- BPN - Pemda

**(8) Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan**

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Percepatan penetapan RTRW prov/kab/kota	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem. PU - Bappenas - Kemendagri - Pemda
2	Penyusunan dan penetapan masterplan kawasan strategis	Mimika, Merauke, Jayawijaya, Nabire, Paniai, Pegunungan Bintang, Keerom	- Kem. PU - Pemda
3	Dilenisasi/pemetaan tanah terhadap hak ulayat	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- BPN - Kem. Sosial - Kem. Kehutanan - Pemda

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
4	Sertifikasi tanah non ulayat	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- BPN - Kem. Sosial - Kem. Kehutanan - Pemda
5	Penyelesaian sengketa pertanahan	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- BPN - Kem. Sosial - Kem. Kehutanan - Pemda

**(9) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban**

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	- (4)
1	Pemetaan masalah sumber konflik antara Pemerintah dengan masyarakat	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kemendagri - Kemhan - Polri - Pemda
2	Pendekatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat Tanah Papua, dalam rangka membangun kesepahaman bidang politik dan budaya	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kemendagri - Kemhan - Pemda
3	Penyusunan rencana kebijakan politik dan budaya	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kemendagri - Kemhan - Pemda
4	Penyiapan mekanisme penyelesaian bersama masalah-masalah sosial politik dan sosial budaya dalam kerangka NKRI	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kemendagri - Kemhan - Polri - Pemda

**(10) Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan**

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	- (4)
1	Penetapan Peraturan Turunan (Operasional) dari UU Nomor 21/2001 (Perdasi, Perdasus dan Pergub)	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kemendagri - Pemda
2	Peningkatan koordinasi antartingkat pemerintahan (Pusat-Provinsi-Kab/Kota)	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kemendagri - Pemda

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Pendidikan dan peningkatan kualitas SDM Aparatur (Kepamongprajaan, Perencanaan, dan Pelaporan Keuangan)	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Bappenas - Kemendagri - Kemkeu - BPKP - UKP4 - Pemda
4	Penyusunan dokumen perencanaan	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Bappenas - Pemda
5	Peningkatan kemampuan SDM aparatur pengadaan barang dan jasa pemerintah	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- LKPP - Pemda
6	Pendirian sekolah kepomongprajaan (STPDN) di Jayapura	<b>Kawasan:</b> Kabupaten Jayapura	- Kemendagri - Pemda
7	Evaluasi berbagai Peraturan Daerah yang menghambat pembangunan (investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat)	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kemendagri - Pemda
8	Evaluasi terhadap pemekaran wilayah Prov, Kab/Kota, Kecamatan dan Kampung	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kemendagri - Pemda
9	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kem.PAN dan RB - Kemendagri - Pemda
10	Peningkatan penanganan di wilayah perbatasan negara.	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua	- Kemendagri - Pemda

#### B. Sinergi Kawasan Strategis dengan MP3EI

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemberian kemudahan berinvestasi (insentif investasi)	<b>Kawasan Strategis :</b> Kab. Jayapura, Kab. Mimika, Kab. Merauke dan Kab. Biak	- BKPM - Pemda

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
2	Pengembangan kawasan strategis Merauke sebagai Pusat Pengembangan Pangan dan Energi Terpadu/ <i>Merauke Integrated Food and Energy Estate</i> (MIFEE)	Kab. Merauke	- BKPM - Kem. ESDM - Kem. PDT - Pemda
3	Pengembangan kawasan strategis Merauke sebagai pusat pengembangan minapolitan	Kab. Merauke	- BKPM - Kem. Kelautan Perikanan - Pemda
4	Pengembangan kawasan strategis Mimika sebagai pusat pengembangan industri dan pertambangan	Kab. Mimika	- BKPM - Kem. Pertanian - Pemda
5	Pengembangan kawasan strategis Biak sebagai pusat pengembangan perikanan dan pariwisata	Kab. Biak	- Kem. Budpar - Pemda
6	Pengembangan kawasan strategis Biak sebagai pusat peluncuran satelit	Kab. Biak	- BPPT - Pemda
7	Pengembangan kawasan strategis Jayapura sebagai pusat perdagangan, industri dan jasa	Kab. Jayapura	- BKPM - Kem. Perdagangan - Kem. Perindustrian - Pemda
8	Pengembangan Skouw sebagai pusat perdagangan antar negara	Kota Jayapura	- BKPM - Kem. PDT - Kem. Perdagangan - Kem. Perindustrian - Pemda
9	Pembangunan Fabrik Semen	Kab. Mimika	- BKPM - BUMN - Kem. Perindustrian - Pemda
10	Pendirian Sekolah Penerbang	Kab. Biak	- Kem. Pertahanan - Kem. Perhubungan - BPPT - Pemda

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
11	Pengembangan teknologi pertanian, peternakan, perikanan di Merauke;	Kab. Merauke	- Kem. Pertanian - BPPT - Kem. Kelautan dan Perikanan - Pemda
12	Membangun Kawasan Industri Tembaga di Timika sebagai lokasi industri pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga dan industri-industri hilir lainnya (anoda, katoda, slab, billet, powder, wire, wire rod, cable).	Kab. Mimika	- Kem. Perindustrian - Kem. ESDM - Pemda

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

ttt.

Retno Pudji Budi Astuti

**RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI PAPUA BARAT  
TAHUN 2011 ~ 2014**

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Maksud dan Tujuan .....	4
<b>II. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.....</b>	<b>5</b>
2.1. Kondisi Geografis Wilayah .....	5
2.2. Demografi .....	6
2.3. Perekonomian Wilayah .....	6
<b>III. JENIS KAWASAN, SASARAN, DAN PROGRAM STRATEGIS.....</b>	<b>6</b>
3.1. Jenis Kawasan di Provinsi Papua Barat .....	6
3.2. Sasaran Pembangunan .....	7
.....	
3.3. Program Pendukung Percepatan .....	9
3.4. Sinergi Kawasan Strategis dan MP3EI .....	11
<b>DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011-2014.....</b>	<b>15</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

---

Sejak ditetapkannya UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Melalui payung hukum ini, Provinsi Papua Barat dan rakyat Papua Barat memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua Barat untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Undang-undang ini memiliki semangat untuk rekonsiliasi dan penyelesaian masalah Provinsi Papua Barat secara menyeluruh maupun pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua Barat serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.

Namun dalam proses, masih belum terlihat perubahan kesejahteraan masyarakat terutama penduduk asli Papua Barat secara signifikan. Melihat perkembangan pembangunan yang berjalan dengan lambat, pemerintah berinisiatif untuk melakukan percepatan melalui penetapan Inpres 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai suatu instrumen kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan di kedua provinsi tersebut melalui peningkatan efektifitas koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan antarsektor dan pusat-daerah yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Inpres 5/2007 menekankan pendekatan kebijakan baru (*the new deals policy for Papua*) dengan lima aspek strategis yaitu:

- a. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan,
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
- c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- d. Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara,
- e. Perlakuan khusus (*affirmative action*) bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia putra-putri asli Papua.

Setelah 2 tahun pelaksanaan Inpres 5/2007, telah dilakukan berbagai koordinasi antara pemerintah pusat (K/L) dan pemerintah Provinsi Papua Barat dan dihasilkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat. Namun berdasarkan evaluasi Inpres 5/2007 menunjukkan bahwa percepatan pembangunan yang dilakukan terutama dalam kaitannya dengan program prioritas pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan masih belum memberikan dampak yang signifikan yang disebabkan masih tersendatnya pembangunan infrastruktur dan belum dilaksanakannya sistem pendidikan khusus bagi masyarakat Papua Barat, serta sarana prasarana pelayanan kesehatan yang masih minim dan kondisi wilayah yang umumnya masih terisolir.

Salah ...

Salah satu penyebab kurang berhasilnya upaya percepatan adalah belum optimalnya pengelolaan dana yang ada terutama sinkronisasi program/kegiatan serta anggaran pusat dan daerah termasuk pendanaan sektoral pusat melalui K/L dan pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur di kedua Provinsi. Untuk itu diperlukan kelanjutan upaya Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan memperluas bidang kebijakan pokok percepatan dengan prinsip pengembangan kawasan yang diarahkan untuk keterpaduan dan sinergi lintas bidang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua dan Papua Barat yang terdiri dari:

- a. Penguatan ketahanan pangan.
- b. Penanggulangan kemiskinan.
- c. Pengembangan ekonomi rakyat.
- d. Peningkatan pelayanan pendidikan.
- e. Peningkatan pelayanan kesehatan.
- f. Pengembangan infrastruktur dasar.
- g. Perlakuan khusus terhadap masyarakat asli Papua dan Papua Barat.

Dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diperlukan dukungan dari kebijakan yang bersifat regulasi dan kelembagaan, terutama :

- a. penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. pengembangan kapasitas kelembagaan.

Selain melalui dukungan program-program di atas, Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat, juga didukung program-program yang terkait dengan agenda pelaksanaan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025, koridor ekonomi Papua-kepulauan Maluku.

Dengan tetap memegang semangat koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program/kegiatan percepatan pembangunan maka masing-masing kebijakan pokok percepatan dan faktor pendukung kebijakan pokok percepatan tersebut perlu dituangkan dalam Rencana Aksi Percepatan Percepatan Provinsi Papua Barat yang mengacu pada RPJMN Nasional 2010-2014 dan RPJM Daerah Provinsi Papua Barat 2012-2016.

Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat disusun oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat melibatkan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat serta perwakilan masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan, untuk melakukan konsultasi penyusunan Rencana Aksi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Penentuan program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana aksi merupakan prioritas dalam rangka percepatan yang sifatnya dikhususkan termasuk juga program dan kegiatan baru yang diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan dalam kurun waktu Tahun 2011-2014.

---

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

---

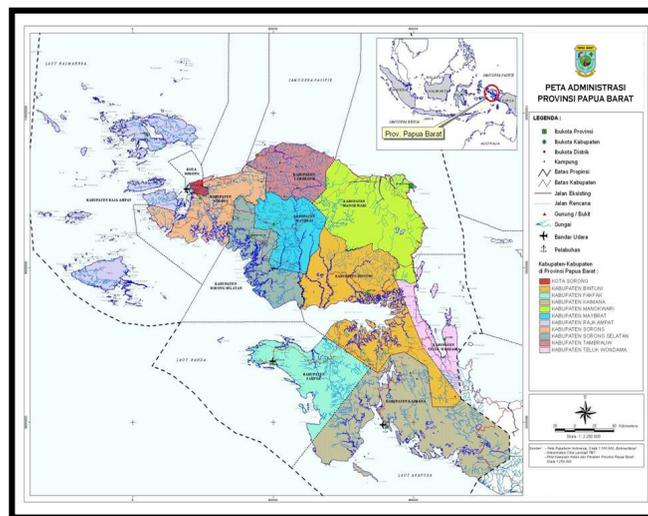
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Provinsi Papua Barat ini adalah untuk :

- a. memberikan penjabaran dan arahan yang jelas dalam percepatan masing-masing kebijakan pokok percepatan maupun faktor pendukung kebijakan pokok percepatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2011-2014;
- b. memberikan penjelasan sasaran, kebijakan, strategi pelaksanaan serta pembiayaan agar memberikan hasil yang optimal;
- c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi berbagai sumber daya yang ada di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dituangkan dalam program dan kegiatan strategi yang menjadi prioritas utama dalam upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat tahun 2011-2014. Program dan kegiatan strategis yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat 2011-2016;
- d. rencana aksi merupakan dokumen perencanaan yang mensinkronkan program/kegiatan pusat-daerah serta rencana pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi serta APBD Kab/Kota serta kontribusi lembaga donor dan swasta (*public-private partnership*);
- e. sebagai bagian dokumen yang dijadikan bahan masukan dalam penyusunan RPJM Daerah Provinsi Papua Barat 2011-2016, maupun RPJM Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

## V. GAMBARAN UMUM UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

### 2.1. KONDISI GEOGRAFIS WILAYAH

Pada tahun 2010, tercatat luas wilayah Provinsi Papua Barat adalah 143.945,62 km<sup>2</sup> yang tercatat terdapat 10 kabupaten dan satu kota seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1

### Peta Administratif Wilayah Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten

Topografi wilayah kepala burung yang menjadi wilayah Provinsi Papua Barat sangat bervariasi dari datar, perbukitan hingga pegunungan tinggi. Daerah lembah-lembah yang datar tersebar di Teluk Bintuni, Isim, Prafi, Warsamson, Wosimi dan Teluk Arguni. Sementara kelompok pegunungan dengan puncak yang mencapai 3.000 m dpl yaitu Pegunungan Arfak, Pegunungan Tambrauw, Pegunungan Kumawa, Pegunungan Fakfak dan Wondiwoi. Kondisi geografi dan topografi Provinsi Papua Barat yang bervariasi ini sangat mempengaruhi pembangunan yang dilakukan dan juga mempunyai andil pada kompleksnya pembangunan di provinsi ini.

### 2.2. DEMOGRAFI

Berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk Tahun 2010, Provinsi Papua Barat dihuni oleh 760.855 jiwa yang terdiri dari 402.587 penduduk laki-laki dan 258.268 penduduk perempuan. Penduduk terkonsentrasi di Kota Sorong (25,03%) dan Kabupaten Manokwari (24,66%) sedangkan kabupaten lain dihuni kurang dari 10% total penduduk. Kabupaten dengan penduduk terkecil terdapat di kabupaten pemekaran baru yaitu Kabupaten Tambrauw yang hanya didiami oleh 6.393 jiwa atau 0,85% dari total penduduk Provinsi Papua Barat.

Sejak ...

Sejak tahun 2000 hingga 2010, penduduk di Papua Barat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni sebesar 3,6% per tahun, di atas laju pertumbuhan rata-rata Indonesia yang hanya sebesar 1,47% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu di Kota Sorong yaitu 4,74% pertahun.

---

### 2.3. PEREKONOMIAN WILAYAH

---

Karena melimpahnya sumber daya alam di Provinsi Papua Barat seperti potensi mineral, kehutanan, dan perikanan maka perekonomian di Provinsi Papua Barat masih didominasi oleh ekonomi ekstraktif. Potensi mineral yang diduga ada di wilayah kepala burung diantaranya gas bumi dan batubara di cekungan Bintuni, emas di Aifat, uranium di Manokwari, minyak bumi di Sorong dan Raja Ampat. Sementara itu, dari potensi hutan diperoleh hasil kayu dari hutan produksi yang bernilai ekonomis tinggi, dan umumnya menjadi komoditi ekspor, seperti jenis merbau, matoa, nyatoh, pulai, mersawa, resak, medang dan bintangur.

Potensi bahan tambang yang siap dieksploitasi antara lain batu bara, emas, uranium dan tembaga serta batu kapur, granit dan pasir kuarsa. Potensi minyak dan gas alam terdapat di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni. Potensi ini yang terbesar adalah di Distrik Merdey, Aranday dan Babo dengan Cadangan Minyak Bumi sebesar 20 TB dan Gas Bumi (LNG) 14 TCF. Potensi minyak yang terdapat di Kabupaten Sorong dan Teluk Bintuni merupakan komoditas unggulan Provinsi Papua Barat yang saat ini sedang dieksploitasi.

## V. JENIS KAWASAN, SASARAN DAN PROGRAM STRATEGIS

### 3.1. JENIS KAWASAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

---

#### 3.1.1. Kawasan Terisolir

Secara geografis, kabupaten dikategorikan masuk dalam Kawasan Terisolir di Provinsi Papua Barat adalah: **Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau** dan **Kabupaten Maybrat**. Kabupaten ini dikategorikan masuk dalam kawasan terisolir karena secara umum hampir sebagian besar wilayah di kabupaten ini belum memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya pembangunan, baik infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan.

#### 3.1.2. Kawasan ...

### 3.1.2. Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan atau perkampungan di Provinsi Papua Barat meliputi **Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni** yang secara geografis dan administratif pemerintahan berdekatan satu sama lainnya serta memiliki potensi yang besar di sektor pertanian dalam arti luas.

### 3.1.3. Kawasan Perkotaan

Secara geografis dan administratif kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat, meliputi **11 ibukota kabupaten/kota**. Manokwari sebagai ibukota Kabupaten Manokwari sekaligus sebagai ibukota Provinsi Papua Barat. Sedangkan Sorong secara administratif pemerintahan telah ditetapkan sebagai Kota karena kondisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang telah berkembang pesat.

### 3.1.4. Kawasan Strategis

Kawasan strategis di Provinsi Papua Barat meliputi **Kabupaten Manokwari, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong**. Pemilihan dan penetapan daerah administratif pemerintahan yang masuk ke dalam kawasan strategis ini, berkaitan dengan rencana akan dibangunnya industri yang bersifat strategis dan berskala nasional. Di samping itu juga sangat berhubungan dengan konsep pembangunan kewilayahan yang tertuang dalam RTRW Provinsi Papua Barat yang telah disetujui oleh Pemerintah, dimana telah diusulkan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II yang meliputi Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kota Sorong dan juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang sekaligus Sorong ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di dalam RTRWN.

---

## 3.2. SASARAN PEMBANGUNAN

---

### 3.2.1. Sasaran Pembangunan Kawasan Terisolir

Sasaran akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan kawasan terisolir di Provinsi Papua Barat sesuai dengan Kerangka Kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B), adalah :

1. Meningkatnya ketahanan pangan lokal melalui optimalisasi potensi bahan pangan lokal.
2. Berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya perekonomian masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam.

3. Terbangunnya ...

3. Terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama yang membuka keterisolasian wilayah melalui peningkatan aksesibilitas transportasi dan informasi serta layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi) di kawasan terisolir.
4. Terjangkaunya pendidikan yang bermutu dan relevan di kawasan terisolir.
5. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat di kawasan terisolir.
6. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi.
7. Semakin berpihak kebijakan kepada penduduk asli Papua Barat, golongan ekonomi kecil dan menengah serta menuju kesetaraan jender dalam proses pembangunan di kawasan terisolir.
8. Meningkatnya keamanan dan ketertiban serta penegakan supremasi hukum di kawasan terisolir.
9. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi di kawasan terisolir.

### **3.2.2. Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan**

1. Meningkatnya ketahanan pangan di kawasan perdesaan di Provinsi Papua Barat.
2. Berkurangnya kemiskinan di kawasan perdesaan di Provinsi Papua Barat.
3. Terjangkaunya pendidikan yang bermutu dan relevan di kawasan perdesaan di Provinsi Papua Barat.
4. Meningkatnya kesehatan masyarakat di kawasan perdesaan di Provinsi Papua Barat.
5. Terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama yang membuka akses transportasi dan informasi serta layanan dasar kehidupan di kawasan perdesaan di Provinsi Papua Barat.
6. Berkembangnya ekonomi masyarakat di kawasan perdesaan di Provinsi Papua Barat.
7. Semakin berpihak kebijakan kepada penduduk asli Papua, golongan ekonomi kecil dan menengah serta menuju kesetaraan jender dalam proses pembangunan di kawasan perdesaan di Provinsi Papua Barat.

### **3.2.3. Sasaran Pembangunan Kawasan Perkotaan**

1. Terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama yang membuka akses transportasi dan informasi serta layanan dasar kehidupan di kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat.
2. Berkembangnya ekonomi masyarakat di kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat.
3. Terjangkaunya pendidikan yang bermutu dan relevan di kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat.

4. Meningkatnya ...

4. Meningkatnya kesehatan masyarakat di kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat.
5. Semakin berpihak kebijakan kepada penduduk asli Papua, golongan ekonomi kecil dan menengah serta wanita menuju kesetaraan dalam proses pembangunan di kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat.

#### **3.2.4. Sasaran Pembangunan Kawasan Strategis**

1. Terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama infrastruktur industri strategis dan pendukungnya di Provinsi Papua Barat.
2. Berkembangnya ekonomi masyarakat di kawasan strategis yang pada gilirannya akan mendongkrak perekonomian daerah di Provinsi Papua Barat dan Nasional.
3. Semakin berpihak kebijakan kepada penduduk asli Papua, golongan ekonomi kecil dan menengah serta menuju kesetaraan jender dalam proses pembangunan di kawasan startegis di Provinsi Papua Barat.
4. Terbentuknya kawasan pertumbuhan ekonomi khusus dan industri strategis di Provinsi Papua Barat.

---

### **3.3. PROGRAM PENDUKUNG PERCEPATAN**

---

Demi tercapainya sasaran akhir dari rencana aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat, maka diperlukan **program strategis** Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat. Untuk itu **program strategis** yang ditetapkan untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 2011-2014 adalah:

#### **1. Program Ketahanan Pangan:**

- a) peningkatan produksi tanaman pangan lokal (sagu, ubi jalar, padi, jagung, ikan);
- b) pengolahan hasil pertanian menjadi bahan makanan (sagu, ubi kayu, jagung, ikan);
- c) peningkatan distribusi hasil pertanian/pangan ke seluruh wilayah terpencil/terisolir.

#### **2. Program Penanggulangan Kemiskinan:**

- a) peningkatan kemampuan Masyarakat dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- b) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat;

c) Peningkatan ...

- c) peningkatan permodalan UMKM dalam usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat;
- d) pendampingan dan Penyuluhan UMKM dalam usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan industri rakyat;
- e) peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) pertanian;
- f) pendampingan pertanian melalui penyediaan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kontrak;
- g) pengembangan teknologi tepat guna usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan industri rakyat;
- h) distribusi dan pemasaran hasil usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan industri rakyat.

**3. Program Pengembangan Ekonomi Rakyat :**

- a) pengembangan agroindustri perikanan (tangkap dan budidaya laut/tawar);
- b) pengembangan agroindustri peternakan (ayam, babi, sapi);
- c) pengembangan hasil hutan (kayu, madu, sagu, buah merah);
- d) pengembangan agroindustri hortikultura (sayur dan buah);
- e) pengembangan agroindustri perkebunan (kopi, pala, cengkeh, kelapa, dan kakao);
- f) pengembangan industri kecil dan kerajinan.

**4. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan :**

- a) pendidikan dasar dan menengah gratis;
- b) peningkatan pendidikan dasar dan menengah berpola asrama;
- c) pendirian sekolah unggulan;
- d) pendirian Sekolah Menengah Kejuruan;
- e) pengadaan tenaga guru kontrak;
- f) peningkatan kualitas kepala sekolah melalui pendidikan dan pelatihan, studi lanjut kedalam dan keluar negeri serta pemagangan di luar Provinsi Papua Barat;
- g) pendirian Sekolah Pendidikan Keguruan;
- h) peningkatan kualitas PTN di Provinsi Papua Barat melalui kerjasama dengan PTN unggulan di luar Provinsi Papua Barat;
- i) peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat.

**5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

- a) pelayanan kesehatan keliling (*mobile clinic*);
- b) asuransi kesehatan;

c) Pelayanan ...

- c) pelayanan kesehatan gratis dan bebas biaya rawat inap untuk pasien kelas 3 RSUD;
- d) pendirian sekolah kebidanan/keperawatan;
- e) pengadaan dokter spesialis melalui kontrak;
- f) pendirian rumah sakit rujukan di Sorong dan Manokwari;
- g) peningkatan jumlah puskesmas pembantu;
- h) peningkatan jumlah puskesmas perawatan;
- i) peningkatan status gizi siswa melalui PMTAS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah);
- j) penyuluhan kesehatan lingkungan (sanitasi lingkungan);
- k) peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat;
- l) pemberantasan penyakit menular (Malaria, HIV AIDS, TBC);
- m) pendirian pusat pelayanan malaria (*malaria centre*).

#### **6. Program Pengembangan Infrastruktur Dasar**

- a) penyediaan 250.000 unit rumah rakyat sehat dan layak huni;
- b) pembangunan dan peningkatan jaringan jalan Manokwari – Sorong – Makbon – Mega;
- c) pembangunan jalan Bintuni – Susumuk;
- d) pembangunan jalan Mameh – Windesi – Wasior;
- e) pembangunan jalan Bomberai – Windesi – Kaimana;
- f) pembangunan irigasi dan pencetakan sawah;
- g) peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan air bersih di seluruh wilayah;
- h) pembangunan dan peningkatan lapangan udara perintis;
- i) peningkatan kapasitas infrastruktur layanan jasa penerbangan bandara udara Manokwari dan Sorong
- j) pembangunan dan peningkatan pelabuhan laut;
- k) penyediaan sumber energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS);
- l) peningkatan jaringan distribusi PLN;
- m) pembangunan PLTU di Manokwari dan Sorong;
- n) pemanfaatan potensi sumberdaya mineral bagi kesejahteraan masyarakat;
- o) peningkatan aksesibilitas komunikasi di wilayah terisolir/terpencil/perbatasan negara;

p) peningkatan ...

- p) peningkatan keterjangkauan informasi seluler melalui kerjasama operator seluler (swasta);
- q) peningkatan pelayanan melalui pemberian izin kepada swasta di bidang penerbangan.

#### **7. Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua Barat**

- a) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi anggota TNI;
- b) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi anggota Polri;
- c) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk sekolah Akmil dan Akpol;
- d) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk sekolah pilot;
- e) pemberian fasilitas bagi putra/putri asli Papua untuk pengembangan bakat/potensi olahraga;
- f) pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi di PTN unggulan di luar Provinsi Papua Barat;
- g) pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi di PTN fakultas kedokteran;
- h) pemberian kesempatan bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi PNS di wilayah lain di luar Provinsi Papua Barat;
- i) pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STAN;
- j) pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STPDN;
- k) pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di sekolah tinggi statistik;
- l) Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di sekolah tinggi pertanian.

#### **8. Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Pertanian**

Adapun program/kegiatan strategis yang akan dilaksanakan adalah :

- a) percepatan penetapan RTRW prov/kab/kota;
- b) penyusunan dan penetapan masterplan kawasan strategis;
- c) dilenisasi/pemetaan tanah terhadap hak ulayat;
- d) sertifikasi tanah non ulayat;
- e) penyelesaian sengketa pertanian.

#### **9. Program ...**

### **9. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban**

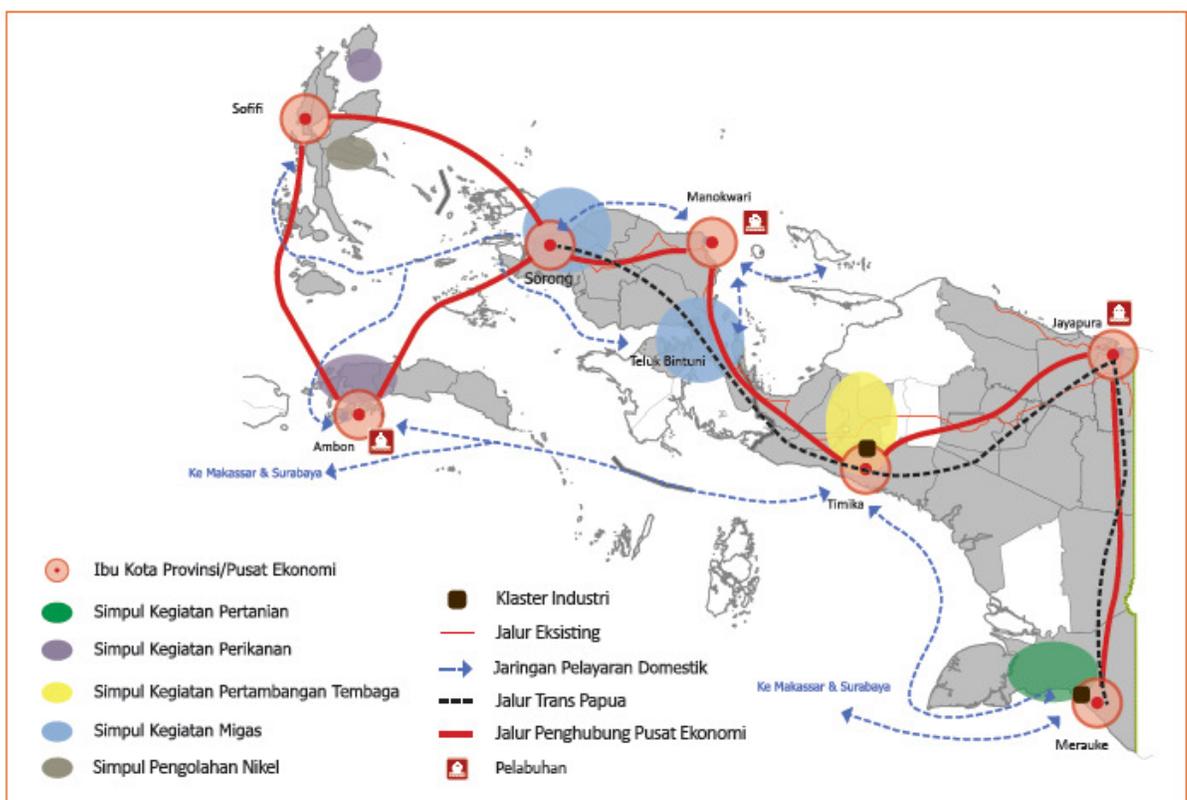
- a) pemetaan masalah sumber konflik antara Pemerintah dengan masyarakat;
- b) pendekatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat Tanah Papua Barat, dalam rangka membangun kesepahaman bidang politik dan budaya;
- c) penyusunan rencana kebijakan politik dan budaya;
- d) penyiapan mekanisme penyelesaian bersama masalah sosial-politik dan sosial-budaya dalam kerangka NKRI.

### **10. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan**

- a) penetapan peraturan turunan (operasional) dari UU Nomor 21/2001 (Perdasi, Perdatus dan Pergub);
- b) peningkatan koordinasi antartingkat pemerintahan (pusat-provinsi-kabupaten/kota);
- c) pendidikan dan peningkatan kualitas SDM aparatur (kepamongprajaan, perencanaan, dan pelaporan keuangan);
- d) penyusunan dokumen perencanaan;
- e) peningkatan kemampuan SDM aparatur pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- f) pendirian sekolah kepamongprajaan (STPDN di Jayapura, Manokwari, Mimika dan Sorong);
- g) evaluasi berbagai peraturan daerah yang menghambat pembangunan (investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat);
- h) percepatan pembentukan Kota Manokwari sebagai daerah otonomi baru di ibu kota Provinsi Papua Barat;
- i) evaluasi terhadap pemekaran wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kampung;
- j) peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
- k) peningkatan pengelolaan kawasan di wilayah perbatasan negara.

### 3.4. SINERGI KAWASAN STRATEGIS DAN MP3EI

Pembangunan kawasan strategis di Provinsi Papua Barat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan dengan pengembangan kluster industri dan atau kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis sumber daya unggulan di kawasan strategis sesuai dengan arahan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025 pada Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku. Kawasan strategis di Provinsi Papua Barat dalam MP3EI 2011-2025 adalah Sorong dan Manokwari.



**Gambar 3.4**  
**Peta Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku**

**Program Pengembangan Wilayah dan Kawasan Strategis (Termasuk MP3EI dan lainnya)**

a) pemberian kemudahan berinvestasi (insentif investasi);

b) pengembangan ...

- b) pengembangan kawasan industri dan perdagangan di Arar Sorong;
- c) pengembangan kawasan ekonomi khusus Teluk Bintuni;
- d) pengembangan kawasan strategis Sorong dan Kaimana sebagai pusat pengembangan minapolitan;
- e) pengembangan kawasan strategis Fak Fak dan Kaimana sebagai pusat pengembangan perkebunan pala;
- f) pengembangan kawasan strategis Raja Ampat sebagai pusat pengembangan perikanan dan pariwisata;
- g) pengembangan kawasan hutan Gunung Meja sebagai Kebun Raya Manokwari/ Ayambori;
- h) pembangunan pabrik semen di Manokwari;
- i) pengembangan peternakan terpadu di Kebar;
- j) pengembangan pertanian dan peternakan terpadu di Bomberai;
- k) pengembangan kawasan minapolitan Weri;
- l) pengembangan agrowisata Kramomongga;
- m) pengembangan objek wisata situs sejarah peradaban orang Papua di Pulau Mansinam, Manokwari;
- n) Pengembangan Migas menjadi pilar yang kuat dalam pertumbuhan Provinsi Papua Barat.

Selain dari program dan kegiatan di atas dalam kawasan strategis telah ditetapkan beberapa program pendukung yang dapat mengungkit pertumbuhan wilayah dalam waktu yang cepat dan menyerap banyak tenaga kerja yang berasal dari masyarakat asli Papua. Beberapa program pendukung P4B yang juga termasuk di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), koridor Papua – kepulauan Maluku antara lain:

- a) pembangunan pabrik semen di Manokwari;
- b) pengembangan peternakan terpadu di Kebar;
- c) pengembangan pertanian dan peternakan terpadu di Bomberai;
- d) pengembangan kawasan minapolitan Weri;
- e) pengembangan agrowisata Kramomongga;
- f) pengembangan kawasan industri dan perdagangan di Arar, Sorong;
- g) pengembangan kawasan ekonomi khusus Teluk Bintuni;
- h) pemberian kemudahan berinvestasi (insentif investasi);
- i) pengembangan kawasan strategis Sorong dan Kaimana sebagai pusat pengembangan minapolitan;
- j) Pengembangan kawasan strategis Fak Fak dan Kaimana sebagai pusat pengembangan perkebunan pala;

k) pengembangan ...

- k) pengembangan kawasan strategis Raja Ampat sebagai pusat pengembangan Perikanan dan Pariwisata;
- l) pengembangan objek wisata situs sejarah peradaban orang papua di Pulau Mansinam, Manokwari;
- m) pengembangan kawasan hutan gunung Meja sebagai Kebun Raya Manokwari/ Ayambori.

**DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011-2014**

**A. Program Pendukung Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat**

**(1) Program Ketahanan Pangan**

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan produksi tanaman pangan lokal (ubi jalar, sagu, padi, jagung, ikan)	<p><b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrau, Kab. Maybrat</p> <p><b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Pemda</li> </ul>
2	Pengolahan hasil pertanian menjadi bahan makanan (sagu, ubi kayu, jagung, ikan)	<p><b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrau, Kab. Maybrat</p> <p><b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- BPPT</li> <li>- Pemda</li> </ul>

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
3	Peningkatan distribusi hasil Pertanian/Pangan ke seluruh wilayah terpencil/terisolir	<p><b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat</p> <p><b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Perdagangan</li> <li>- Pemda</li> </ul>

(2) Program Penanggulangan Kemiskinan

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan kemampuan Masyarakat dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	<p><b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat</p> <p><b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Kop &amp; UMKM</li> <li>- Pemda</li> </ul>
2	Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat	<p><b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat</p> <p><b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- Pemda</li> </ul>

3. Peningkatan ...

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
3	Peningkatan permodalan UMKM usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Kop &amp; UMKM</li> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- Pemda</li> </ul>
4	Pendampingan dan Penyuluhan UMKM usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Kop &amp; UMKM</li> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- Pemda</li> </ul>
5	Peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui Pendirian BLK Pertanian	<b><u>Kawasan Strategis :</u></b> Kab. Manokwari, Kab. Sorong, Kota Sorong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Nakertrans</li> <li>- Pemda</li> </ul>
6	Pendampingan Pertanian melalui Penyediaan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kontrak	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Nakertrans</li> <li>- Pemda</li> </ul>

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
7	Pengembangan Teknologi Tepat Guna usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Kop &amp; UMKM</li> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- BPPT</li> <li>- Pemda</li> </ul>
8	Distribusi dan Pemasaran hasil usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat</p> <p><b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Kop &amp; UMKM</li> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- Kem. PDT</li> <li>- BPPT</li> <li>- Pemda</li> </ul>

(3) Program Pengembangan Ekonomi Rakyat

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
1	Pengembangan agroindustri Perikanan (tangkap dan budidaya laut/tawar)	<p><b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Pemda</li> </ul>

Kawasan ...

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		<b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana	-
2	Pengembangan agroindustri Peternakan (Ayam, Babi, Sapi)	<b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrau, Kab. Maybrat  <b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana	- Kem. Pertanian - Pemda
3	Pengembangan Hasil Hutan (Kayu, Madu, Sagu, Buah Merah)	<b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrau, Kab. Maybrat  <b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana	- Kem. Perindustrian - Kem. Kehutanan - Pemda
4	Pengembangan agroindustri Hortikultura (Sayur dan Buah)	<b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana	- Kem. Pertanian - Kem. Perindustrian - Pemda

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
5	Pengembangan agroindustri perkebunan (kopi, pala, cengkeh, kelapa, kakao)	<b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- Kem. Kehutanan</li> <li>- Kem. Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Pemda</li> </ul>
6	Pengembangan industri kecil dan kerajinan	<b>Kawasan Strategis :</b> Kab. Manokwari, Kab. Sorong, Kota Sorong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- Pemda</li> </ul>

(4) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
1	Pendidikan dasar dan menengah gratis	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pendidikan Nasional</li> <li>- Pemda</li> </ul>
2	Peningkatan pendidikan dasar dan menengah berpola asrama	<p><b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat</p> <p><b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pendidikan Nasional</li> <li>- Pemda</li> </ul>
3	Pendirian sekolah unggulan	<b>Kawasan Perkotaan :</b> Di seluruh ibukota kabupaten/kota di Prov. Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Pendidikan Nasional</li> <li>- Pemda</li> </ul>

4. Pendirian ...

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
4	Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan	<b>Kawasan Strategis :</b> Kab. Manokwari, Kab. Fak Fak, Kota Sorong	- Kem. Pendidikan Nasional - Pemda
5	Pengadaan tenaga guru kontrak	<b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat  <b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana	- Kem. Pendidikan Nasional - Pemda
6	Peningkatan kualitas kepala sekolah melalui pendidikan dan pelatihan, studi lanjut dalam negeri dan luar negeri serta pemagangan di luar Papua	<b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat  <b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana	- Kem. Pendidikan Nasional - Pemda
7	Pendirian Sekolah Pendidikan Keguruan	<b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat  <b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana  <b>Kawasan Perkotaan:</b> Manokwari, Kota Sorong, Fak Fak	- Kem. Pendidikan Nasional - Pemda

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
8	Peningkatan kualitas PTN di Papua Barat melalui kerjasama dengan PTN unggul di luar Papua	<b>Kawasan Perkotaan :</b> Kab. Manokwari	- Kem. Pendidikan Nasional - Pemda
9	Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Swasta di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat	<b>Kawasan Perkotaan:</b> Manokwari, Kota Sorong, Fak Fak	- Kem. Pendidikan Nasional - Pemda

(5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
1	Pelayanan Kesehatan Keliling	<b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat  <b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana	- Kem. Kesehatan - Pemda
2	Asuransi Kesehatan	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem. Kesehatan - Pemda
3	Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bebas Biaya Rawat Inap Untuk Pasien kelas 3 RSUD	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem. Kesehatan - Pemda
4	Pendirian Sekolah Kebidanan/keperawatan	<b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat	- Kem. Kesehatan - Pemda

Kawasan ...

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		<b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana	-
5	Pengadaan Dokter Spesialis melalui Kontrak	<b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat  <b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana	- Kem. Kesehatan - Pemda
6	Pendirian Rumah Sakit Rujukan di Sorong dan Manokwari	<b><u>Kawasan Perkotaan :</u></b> Kab. Sorong, Kab. Manokwari	- Kem. Kesehatan - Pemda
7	Peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu	<b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat  <b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana	- Kem. Kesehatan - Pemda

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
8	Peningkatan jumlah Puskesmas Perawatan	<b><u>Kawasan Terisolir :</u></b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat  <b><u>Kawasan Perdesaan :</u></b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana	- Kem. Kesehatan - Pemda
9	Peningkatan Status Gizi Siswa melalui PMTAS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah)	<b><u>Seluruh Kawasan :</u></b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem. Kesehatan - Pemda
10	Penyuluhan kesehatan lingkungan (sanitasi lingkungan)	<b><u>Seluruh Kawasan :</u></b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem. Kesehatan - Pemda
11	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kab/ Kota di Provinsi Papua Barat	<b><u>Seluruh Kawasan :</u></b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem. Kesehatan - Pemda
12	Pemberantasan penyakit menular (Malaria, HIV AIDS, dan TBC)	<b><u>Seluruh Kawasan :</u></b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem. Kesehatan - Pemda
13	Pendirian Pusat Pelayanan Malaria (Malaria Centre)	<b><u>Seluruh Kawasan :</u></b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem. Kesehatan - Pemda

**(6) Program Pengembangan Infrastruktur Dasar**

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
1	Penyediaan 250.000 unit rumah rakyat sehat dan layak huni	<b><u>Seluruh Kawasan :</u></b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem. PU - Kem. Sosial - Pemda

2. Pembangunan ...

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
2	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan Manokwari – Sorong - Makbon - Mega	<b>Kawasan Strategis :</b> Kab. Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Manokwari	- Kem. Kehutanan - Kem. PU - Pemda
3	Pembangunan jalan Bintuni – Susumuk	<b>Kawasan Pedesaan:</b> Kab. Bintuni, Kab. Sorong Selatan	- Kem. Kehutanan - Kem. PU - Pemda
4	Pembangunan jalan Mameh – Windesi - Wasior	<b>Kawasan Pedesaan:</b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama	- Kem. Kehutanan - Kem. PU - Pemda
5	Pembangunan jalan Bomberai – Windesi - Kaimana	<b>Kawasan Pedesaan:</b> Kab. Fak Fak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Kaimana	- Kem. Kehutanan - Kem. PU - Pemda
6	Pembangunan irigasi dan pencetakan sawah	<b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Fak Fak	- Kem. PU - Pemda
7	Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan air bersih di seluruh wilayah	<b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat  <b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana	- Kem. PU - Pemda

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
8	Pembangunan dan peningkatan lapangan udara perintis	<b><u>Kawasan Terisolir</u></b> : Kab. Raja Ampat  <b><u>Kawasan Perdesaan</u></b> : Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana	- Kem. Perhubungan - Pemda
9	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Layanan Jasa Penerbangan Bandara Udara Manokwari dan Sorong	<b><u>Kawasan Perkotaan</u></b> : Kab. Manokwari, Kota Sorong	- Kem. Perhubungan - Pemda
10	Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Laut	<b><u>Kawasan Terisolir</u></b> : Kab. Raja Ampat  <b><u>Kawasan Perdesaan</u></b> : Kab. Manokwari, Kab. Sorong, Kab. Kaimana, Kab. Fak Fak	- Kem. Perhubungan - Pemda
11	Penyediaan Sumber Energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS)	<b><u>Seluruh Kawasan</u></b> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem. ESDM - Pemda
12	Peningkatan jaringan distribusi PLN	<b><u>Seluruh Kawasan</u></b> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem. ESDM - Pemda
13	Pembangunan PLTU di Manokwari dan Sorong	Kab. Manokwari dan Kab. Sorong	- Kem. ESDM - Pemda
14	Pemanfaatan potensi sumber daya mineral bagi kesejahteraan masyarakat	<b><u>Seluruh Kawasan</u></b> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem. ESDM - Pemda

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
15	Peningkatan aksesibilitas komunikasi di wilayah terisolir/terpencil/perbatasan negara	<p><b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Raja Ampat, Kab Maybrat</p> <p><b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Kominfo</li> <li>- Pemda</li> </ul>
16	Peningkatan keterjangkauan informasi seluler melalui kerjasama operator seluler (swasta)	<p><b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat</p> <p><b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Kominfo</li> <li>- Pemda</li> </ul>
17	Peningkatan pelayanan melalui pemberian izin kepada swasta di bidang penerbangan	<p><b>Kawasan Terisolir :</b> Kab. Raja Ampat</p> <p><b>Kawasan Perdesaan :</b> Kab. Teluk Bintuni, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Perhubungan</li> <li>- Pemda</li> </ul>

(7) Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
1	Pemberian kesempatan dan kuota bagi Putra/Putri Asli Papua Barat untuk menjadi anggota TNI	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	Pemda
2	Pemberian kesempatan dan kuota bagi Putra/Putri Asli Papua Barat untuk menjadi anggota Polri	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Pemda

3. Pemberian ...

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
3	Pemberian kesempatan dan kuota bagi Putra/Putri Asli Papua Barat untuk sekolah Akmil dan Akpol	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kemhan - Pemda
4	Pemberian kesempatan dan kuota bagi Putra/Putri Asli Papua Barat untuk sekolah pilot	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem.Pehubungan - Pemda
5	Pemberian fasilitas bagi Putra/Putri Asli Papua Barat untuk pengembangan bakat/potensi olahraga	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem.Diknas* - Pemda
6	Pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi di PTN unggul di Luar Papua Barat	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem.Diknas* - Pemda
7	Pemberian beasiswa dan kouta bagi siswa berprestasi di PTN Fak. Kedokteran	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem.Diknas* - Pemda
8	Pemberian kesempatan bagi Putra/Putri Asli Papua Barat untuk menjadi PNS diwilayah lain di luar Papua Barat	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kemendagri - Kem. PAN dan RB - Pemda
9	Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STAN	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kemkeu - Pemda
10	Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STPDN	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kemendagri - Pemda
11	Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Statistik	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- BPS - Pemda
12	Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- BPN - Pemda

**(8) Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan**

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
1	Percepatan penetapan RTRW Kab/Kota	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem. PU - Bappenas - Kemendagri - Pemda
2	Penyusunan dan penetapan Masterplan Kawasan Strategis	Kab. Manokwari, Kab. Sorong, Kota Sorong	- Kem. PU - Pemda
3	Dilenisasi/pemetaan tanah terhadap hak ulayat	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- BPN - Kem. Sosial - Kem. Kehutanan - Pemda
4	Sertifikasi tanah non ulayat	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- BPN - Kem. Sosial - Kem. Kehutanan - Pemda
5	Penyelesaian sengketa pertanahan	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- BPN - Kem. Sosial - Kem. Kehutanan - Pemda

**(9) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban**

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
1	Pemetaan masalah sumber konflik antara Pemerintah dengan masyarakat	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kemendagri - Kemhan - Polri - Pemda
2	Pendekatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat Tanah Papua, dalam rangka membangun kesepahaman bidang politik dan budaya	<u>Seluruh Kawasan</u> : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kemendagri - Kemhan - Pemda

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
3	Penyusunan rencana kebijakan politik dan budaya	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kemendagri - Kemhan - Pemda
4	Penyiapan mekanisme penyelesaian bersama masalah-masalah sosial politik dan sosial budaya dalam kerangka NKRI	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kemendagri - Kemhan - Polri - Pemda

(10) Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
1	Penetapan Peraturan Turunan (Operasional) dari UU Nomor 21/2001 2001 (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Perdasus)	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kemendagri - Pemda
2	Peningkatan koordinasi antartingkat pemerintahan (Pusat-Provinsi-Kab/Kota)	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kemendagri - Pemda
3	Pendidikan dan peningkatan kualitas SDM Aparatur (Kepamongprajaan, Perencanaan, dan Pelaporan Keuangan)	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Bappenas - Kemendagri - Kemkeu - BPKP - UKP4 - Pemda
4	Penyusunan dokumen perencanaan	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Bappenas - Pemda
5	Peningkatan kemampuan SDM aparatur pengadaan barang dan jasa pemerintah	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- LKPP - Pemda

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
6	Pendirian sekolah kepomongprajaan (STPDN di Jayapura, Manokwari, Mimika, Sorong)	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kemendagri - Pemda
7	Evaluasi berbagai Peraturan Daerah yang menghambat pembangunan (investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat)	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kemendagri - Pemda
8	Percepatan Pembentukan Kota Manokwari sebagai Daerah Otonomi Baru di Ibu Kota Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari	- Kemendagri - Pemda
9	Evaluasi terhadap pemekaran wilayah Prov, Kab/Kota, Kecamatan	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kemendagri - Pemda
10	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	<b>Seluruh Kawasan :</b> Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat	- Kem.PAN dan RB - Kemendagri - Pemda
11	Peningkatan penanganan di wilayah perbatasan negara	Kab. Raja Ampat	- BNPP - Kemendagri - Pemda

### B. Sinergi Kawasan Strategis dengan MP3EI

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
1	Pemberian kemudahan berinvestasi (insentif investasi)	<b>Kawasan Strategis :</b> Kab. Manokwari, Kab. Sorong, Kota Sorong	- BKPM - Pemda
2	Pengembangan kawasan industri dan Perdagangan di Arar Sorong	<b>Kawasan Strategis:</b> Kab. Sorong	- BKPM - Kem. Perindustrian - Perdagangan - Pemda

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
3	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Teluk Bintuni	<b><u>Kawasan Strategis:</u></b> Kab. Teluk Bintuni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKPM</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Pemda</li> </ul>
4	Pengembangan Kawasan Strategis Sorong dan Kaimana sebagai pusat pengembangan Minapolitan	<b><u>Kawasan Strategis:</u></b> Kab. Sorong, Kab. Kaimana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKPM</li> <li>- Kem. Kelautan Perikanan</li> <li>- Pemda</li> </ul>
5	Pengembangan Kawasan Strategis Fak Fak dan Kaimana sebagai pusat pengembangan Perkebunan Pala	<b><u>Kawasan Strategis:</u></b> Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKPM</li> <li>- Kem. Pertanian</li> <li>- Pemda</li> </ul>
6	Pengembangan Kawasan Strategis Raja Ampat sebagai pusat pengembangan Perikanan dan Pariwisata	<b><u>Kawasan Strategis:</u></b> Kab. Raja Ampat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Kelautan Perikanan</li> <li>- Kem. Budpar</li> <li>- Pemda</li> </ul>
7	Pengembangan Kawasan Hutan Gunung Meja sebagai Kebun Raya Manokwari/Ayambori	<b><u>Kawasan Strategis:</u></b> Kab. Manokwari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kem. Budpar</li> <li>- Pemda</li> </ul>
8	Pembangunan Pabrik Semen di Manokwari	<b><u>Kawasan Strategis:</u></b> Kab. Manokwari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKPM</li> <li>- BUMN</li> <li>- Kem. Perindustrian</li> <li>- Pemda</li> </ul>
9	Pengembangan peternakan terpadu di Kebar	<b><u>Kawasan Strategis:</u></b> Kab. Manokwari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKPM</li> <li>- BUMN</li> <li>- Kem. pertanian</li> <li>- Pemda</li> </ul>
10	Pengembangan pertanian dan peternakan terpadu di Bomberai	<b><u>Kawasan Strategis:</u></b> Kab. Fak Fak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKPM</li> <li>- BUMN</li> <li>- Kem. pertanian</li> <li>- Pemda</li> </ul>

No	Kegiatan	Lokasi	Instansi Pelaksana
11	Pengembangan Kawasan Minapolitan Weri	<b>Kawasan Strategis:</b> Kab. Fak Fak	- BKPM - BUMN - Kem. Kelautan dan Perikanan - Pemda
12	Pengembangan Agrowisata Kramomongga	<b>Kawasan Strategis:</b> Kab. Fak Fak	- BKPM - BUMN - Kem. pertanian - Pemda
13	Pengembangan Objek Wisata Situs Sejarah Peradaban Orang Papua di Pulau Mansinam, Manokwari	<b>Kawasan Strategis:</b> Kab. Manokwari	- Kem. Budpar - Pemda
14.	Pengembangan Migas menjadi pilar yang kuat dalam pertumbuhan Provinsi Papua Barat	<b>Kawasan Strategis:</b> Kab. Sorong dan Kab. Teluk Bintuni	- Kem. ESDM - Pemda

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

ttt.

Retno Pudji Budi Astuti